

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, terj. Oleh Sahat Simamora, Jakarta : CV Rajawali, 1984.
- Asrinaldi, *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014.
- A.M Hendropriyono, *Filsafat Intelijen : Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2013.
- Bagong Suryanto dan Sutinah (Eds.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik*, Alih Bahasa oleh Sahat Simamora, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.
- Forum Kajian Seskoad, *Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad 1992- 1993*”, Jakarta: Kerjasama Forum Pengkajian Seskoad dan PT GramediaWidiasarana Indonesia, 1993.
- Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Terj. Oleh Sumarthana, Jakarta: PT Surya Usaha Ningtias, 1999.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Di alih bahasakan oleh Tri Wibowo B.S, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.
- Petrik Matanasi, *Sejarah Tentara : Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Narasi.
- Semdam VIII Brawidjaja, Sam Karya Bhirawa Anoraga, *Sedjarah Militer KODAM VIII/Brawidjaja*.
- Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini, dan Kelak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Samuel P. Huntington, *Tertib Politik: Pada Masyarakat yang sedang Berubah*, Terj. Oleh Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terj. Oleh Asril Marjohan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995

Seri Prisma, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.

Ulf Sandhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Terj. Oleh Hasan Basri, Jakarta : LP3ES, 1988.

Yahya A. Muhaimin, “*Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

#### **E-Book:**

Adnan Topan Husodo dkk, *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*, Jakarta Selatan: ICW.

Buku Putih Pertahanan Nasional tahun 2015

Harris Y.P Sibuea, Peneliti bidang hukum pada Pusat Pengkajian, Pengelohan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, *Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. 2013. (Info Singkat. Vol. V, no. 10/II/P3DI/Mei/2013)

Indria Samego Dkk, *Bila ABRI Menghendaki : Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwi Fungsi ABRI*, Bandung : Mizan, 1998

KontraS, *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2005

Propatria Institute, Monograph No – 6. *Kajian Kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan*. 2006

Tim Peneliti PPW-LIPI, *Tentara Mendamba Mitra*, Bandung : Mizan, 1999.

#### **Aturan/Perundang-undangan**

Lembar Penerangan Pasukan Nomor : 27 / XI / 2016 / Penpas, Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, di terbitkan 16 November 2016.

Lembar Penerangan Pasukan Nomor : 26 / XI / 2016 / Penpas, Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, di terbitkan 2 November 2016.

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Permenhan RI) No. 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Permenhan RI) No. 58 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan Penetapan "Keadaan Bahaya".

TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

### **Skripsi/Jurnal:**

Ahmad Negara Dalimunthe, Sikap Politik KAMMI Daerah Sumatera Barat (*Studi Kasus Penolakan KAMMI Daerah Sumatera Barat Terhadap Putusan Mahkamah Agung Menolak Kasasi 33 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 1999-2004*), Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas: Padang, Tahun 2007.

Arie Sujito, *Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi : Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM, Volume 6, Nomor 1, Juli 2002.

Hadi Nafis Kamil, *Militer dan Kekuatan Politik: Studi tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*, Skripsi Program Studi

Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, Tahun 2009.

Isnu Novia Setiawati dan Sumarno, *Perkembangan ABRI Masuk Desa (AMD) tahun 1980-1988*, Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, Vol-3 No.1, Maret 2015.

M. Ichsan Kabullah, *Konflik Internal Parpol (Studi Kasus Konflik Internal DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi Periode Kepemimpinan 2004-2009)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas: Padang, Tahun 2007.

Nurhasanah Leni, *Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik Di Indonesia*, Jurnal TAPIs, Volume 9, No.1 Januari-Juni 2013.

Ryllian Chandra, *Perbantuan TNI Kepada Pemerintahan Daerah*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Volume-1, Nomor 2, Januari 2016.

Zefanya Abinesar Dhanendra Putra, *Peran dan Reposisi TNI dalam Politik di Indonesia : Studi Kasus Reformasi Gelombang Kedua*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Airlangga: Surabaya, Tahun 2010.

### **Media Cetak/Daring**

Andi Widjajanto, *Menggeser Peran Teritorial TNI*, Opini Media Indonesia, 30 Maret 2005.

BBC Indonesia, 11 Maret 2016, *Pengamat menilai militer Indonesia lebarkan pengaruh* (online), di akses pada 2 Januari 2017, pukul 11.00 WIB.

Detik.com, 16 Juni 2017, *Soal Keterlibatan di Pertanian, TNI AD : itu Perintah Presiden* (Online), di akses pada 17 Juni 2017, pukul 17.00 WIB

Kompas, 4 Oktober 2016, *Panglima Berharap suatu saat anggota TNI punya hak politik* (online). Di akses pada 1 Januari 2017, pukul 11.10 WIB.

Merdeka.com, 8 Oktober 2016. *Hak Politik TNI Bukan Untuk Maju di Pemilihan Umum* (online). Diakses pada 1 Januari 2017, pukul 10.20 WIB.

Kompas, 7 Oktober 2016. *TNI Boleh Miliki Hak Politik Memilih Tetapi* (online). Diakses pada 1 Januari 2017, pukul 10.05 WIB.

Tempo, 07 Oktober 2016, *Hak Politik Tentara, Istana tak Dukung Panglima TNI* (online). Di akses pada 10 Februari 2017, pukul 10.00 WIB.

Kompas, 8 Oktober 2016. *Pengembalian Hak Politik bisa lemahkan Profesionalitas TNI* (online). Diakses pada 1 Januari 2017, pukul 10.40 WIB.

Website TNI <http://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, di akses 23 Maret 2017.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Al A'raf, Direktur Imparsial, 4 April 2017, Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Ali Nurachman HR, Kasi KU SSP (Kaji Ulang Strategi Sistem Pertahanan), 9 Mei 2017, Gedung Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Lt.4, Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Ardi Manto Adiputra, Koordinator Peneliti Imparsial, 3 April 2017, Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Caesar Moses, Tenaga Ahli Komisi 1 DPR RI, 20 Maret 2017, Gedung Nusantara II DPR RI, lt.2, Senayan, Jakarta.

Wawancara dengan Dr. Saafroedin Bahar, Purnawirawan TNI-AD dan Mantan Anggota DPR RI Fraksi ABRI, 17 Maret 2017, Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Dr. TB Hasanuddin, SE.,MM., Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, 05 April 2017, Gedung Nusantara 1 DPR RI lantai VIII, Senayan, Jakarta.

Wawancara dengan Kolonel Infanteri Jubei Levianto, Kepala Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Direktorat Kebijakan Strategi Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kasubdit jaklak ditjakstra ditstrahan Kemhan RI), 9 Mei 2017, Gedung Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, lt.4, Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Mayjen (Purn) TNI M. Fuad Basya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI 2014-2015, 9 Mei 2017, Sekretariat IKM, Rajawati Timur, Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 17 Maret 2017, Gedung LIPI, Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Prof. Salim Said, Pakar Militer dan Politik, Guru Besar Tetap Universitas Pertahanan, 7 April 2017, Jakarta Pusat.

**Dokumentasi lainnya :**

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Gerakan Riau Menuntut Indonesia (Geram Indonesia) tahun sidang 2006-2007, tanggal pelaksanaan Selasa 21 November 2006.

